



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FITRIYANTO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632894

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 30.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1024 m<sup>2</sup>/180 m<sup>2</sup> di SITUBONDO, WARISAN Rp. 30.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 162.100.000

1. MOTOR, HONDA NEW MEGA PRO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT F1 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA CB 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
4. LAINNYA, HUMBER SEPEDA ONTEL Tahun 1940, LAINNYA Rp. 1.100.000
5. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 127.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 13.050.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 26.279.448

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 36.800.000

**Sub Total** Rp. 268.229.448

**III. HUTANG** Rp. 15.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 253.229.448

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.